

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 74 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN DI UPTD PUSKESMAS CIKATOMAS KABUPATEN TASIKMALAYA

Nofansyah

STIA YPPT Priatim Tasikmalaya

e-mail co Author: *nofansyah@gmail.com

ABSTRAK

Puskesmas masih menjadi tujuan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatannya. Kesadaran masyarakat akan pelayanan kesehatan semakin meningkat seiring dengan pengetahuan dan fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah berupa jaminan sosial bidang kesehatan. Permasalahan yang sering muncul dalam mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas yaitu ketersediaan obat-obatan dan kebutuhan medis lainnya, termasuk di UPTD Puskesmas Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya. Penelitian ini bertujuan menganalisis tentang Implementasi Kebijakan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di UPTD Puskesmas Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya. Penelitian menggunakan metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara sencedara mendalam. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi terhadap keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di UPTD Puskesmas Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya. Kesimpulan dari penelitian ini perlu adanya peningkatan sumber daya manusia, fasilitas yang memenuhi standar pelayanan dan dukungan anggaran yang memadai untuk mencapai keberhasilan dari implementasi kebijakan.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Pusat Kesehatan Masyarakat, Kefarmasian.

PENDAHULUAN

Kesehatan masyarakat merupakan salah satu investasi yang dimiliki oleh sebuah Negara, termasuk Indonesia. Kondisi masyarakat yang sehat dapat menunjang terhadap kelancaran berbagai pembangunan bangsa, dan melalui pelayanan kesehatan yang memadai, murah, terjangkau dan berkesinambungan merupakan harapan semua pihak, sehingga kesehatan masyarakat dapat terus terjaga atau bersifat preventif, dibandingkan dengan perawatan kesehatan yang tentu lebih memerlukan biaya yang lebih besar.

Pemerintah berbagai tingkatan memiliki kewajiban untuk memastikan tersedianya infrastruktur kesehatan masyarakat yang memadai sebagai hal yang mendasar dari sistem kesehatan masyarakat agar berfungsi dengan baik, seperti adanya analisis dan penggunaan data, perencanaan kesehatan, pengembangan

kemitraan dan mobilisasi masyarakat, pengembangan kebijakan, analisis dan dukungan keputusan, komunikasi antar organisasi terkait, dan penelitian-penelitian bidang kesehatan, serta perlu adanya evaluasi dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat itu sendiri.

Pemerintah sendiri telah menerbitkan berbagai kebijakan dalam bidang kesehatan, dan telah berusaha mendekatkan fasilitas pelayanan kepada masyarakat, dimana salah satunya dengan mendirikan Pusat Pelayanan Kesehatan atau Puskesmas, baik di perkotaan maupun perdesaan. Puskesmas masih menjadi tujuan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan pada saat ini, dimana Puskesmas yang ada saat ini telah diperkuat oleh adanya Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling.

Berbagai hambatan dalam melaksanakan standar kefarmasian oleh Puskesmas dilihat dari isi kebijakan masih terjadi, dimana salah satunya terjadi pada Puskesmas Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya. Pelaksanaan kebijakan tersebut masih mengalami berbagai hambatan dalam memenuhi berbagai tuntutan kebijakan. Adapun jumlah penduduk yang berada di wilayah kerja Puskesmas Cikatomas sebanyak 52.513 jiwa. Selanjutnya berdasarkan data yang diperoleh jumlah kunjungan masyarakat terhadap Puskesmas dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1
Data Kunjungan Masyarakat/Pasien di Puskesmas Cikatomas
Kabupaten Tasikmalaya Periode 2019-2021

Tahun	Jumlah (Orang)	Jenis Pembayaran		Jenis obat	
		Jaminan Kesehatan	Non-Jaminan Kesehatan	Generik	Non generik
2019	31.526	8.750.	22.726	181	-
2020	28.907	7..272	21.635	176	-
2021	22.401	2.048	20353	187	-

Sumber : UPTD Puskesmas Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022.

Berdasarkan data di atas menunjukkan selama tiga tahun terakhir pasien lebih memilih obat Generik, dan tidak ada yang menggunakan obat selain Generik, dimana selama tiga tahun mengalami kenaikan terhadap penggunaan obat generik. Dalam pelayanan kesehatan pada umumnya masyarakat banyak menggunakan jaminan kesehatan, dan pihak Puskesmas sebagian besar menyediakan oba-obatan generik yang relatif lebih murah dan terjangkau oleh masyarakat, pihak Puskesmas kurang menyediakan obat-obatan non-generik sehingga pasien harus membeli diluar puskesmas.

Permasalahan lainnya kemampuan sumber daya manusia masih kurang, sebagai contoh dalam menganalisis dalam perencanaan tentang kebutuhan ketersediaan kefarmasian yang sering dibutuhkan oleh masyarakat atau pasien agar dalam pelayanannya lebih efektif dan efisien oleh Apoteker dan pejabat pengadaan

dengan pemegang program, baik dengan pihak Pustu/Bides maupun dengan unit pelayanan, dan adanya keterbatasan anggaran untuk menyediakan bidang kefarmasian yang dapat memenuhi kebutuhan pasien, sebagai contoh pihak Puskesmas hanya menyediakan sebagian besar obat-obatan generik, sehingga untuk obat non-generik yang diresepkan oleh dokter tidak tersedia.

LANDASAN TEORI

Kebijakan merupakan respons terhadap masalah dengan menggunakan serangkaian tindakan atau inisiatif yang terstruktur. Kebijakan sebagai sebuah cara untuk dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang sedang terjadi untuk mencari jalan keluarnya. Kebijakan sebagaimana dikemukakan Easton (Anderson, 1997) dengan memberikan penjelasan bahwa: “Kebijakan berhubungan dengan *political system theory* yang mengidentifikasikan institusi dan aktivitas di dalam sebuah masyarakat yang membuat keputusan otoritatif yang terkait dalam suatu masyarakat, intinya bahwa kebijakan publik merupakan hasil perjuangan kelompok”.

Kebijakan sering kali berkaitan dengan teori sistem politik yang mengidentifikasi lembaga dan kegiatan masyarakat yang membuat keputusan secara otoritatif terkait dengan kepentingan masyarakat, yang pada dasarnya kebijakan publik merupakan hasil dari perjuangan kelompok atau masyarakat. Istilah kebijakan tidak saja berlaku bagi pemerintah, tetapi setiap organisasi dan kelompok, sektor swasta bahkan individu. Kebijakan muncul ketika membutuhkan penyelesaian terhadap persoalan-persoalan yang harus dicari jalan keluarnya.

Menurut Hasswell dan Kaplan (Rusli, 2015) memberikan pendapatnya tentang kebijakan dengan mengemukakan bahwa: “Kebijakan sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai, dan praktek-praktek yang terarah”. Kebijakan dapat dibuat oleh individu, kelompok, organisasi maupun oleh pemerintah. Definisi kebijakan publik yang secara umum dilakukan oleh pemerintah, menurut pendapat (Dye, 2011) dengan menyatakan: “*Public policy is whatever governments choose to do or not to do*”.

Kebijakan publik dibuat atas dasar keputusan yang dibuat terutama oleh pengambil keputusan dengan memilih dan menyeimbangkan kepentingan yang diwakili oleh individu, kelompok dan organisasi. Kebijakan publik didasarkan pada keseimbangan antara nilai-nilai individu dan social, dimana dari nilai-nilai ini diperoleh tujuan, prinsip dan gaya implementasi dan intervensi kebijakan. Semua pilihan dan keputusan kebijakan publik pada setiap tahap siklus kebijakan merupakan rangkaian politik yang mengedepankan beberapa hal lebih penting daripada yang lain, dan adanya tindakan yang akan berdampak positif dan yang lain akan berdampak negatif pada masyarakat.

Easton (Islamy, 2004) menyatakan: “Kebijakan publik adalah pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat”. Kebijakan publik secara luas merupakan sistem undang-undang, langkah-langkah pengaturan, rencana pelaksanaan, dan prioritas pendanaan mengenai subjek tertentu

yang ditetapkan oleh pemerintah atau badan-badan pelaksana. Kebijakan publik mempengaruhi apa yang dilakukan pemerintah dan bagaimana keputusan pemerintah dibuat, hal tersebut menentukan tindakan yang dipilih pemerintah untuk diterapkan atau diprioritaskan, serta tindakan yang diputuskan untuk tidak dilakukan.

Kebijakan publik memiliki arti yang sangat luas, tidak hanya mencakup undang-undang dan peraturan, tetapi juga bagaimana sumber daya dialokasikan dan apa yang diprioritaskan. Pejabat terpilih dan entitas pemerintah secara bersamaan membentuk dan mengimplementasikan kebijakan public, dan ketika legislator atau regulator memutuskan untuk mengesahkan undang-undang, menetapkan agenda legislatif, atau menerapkan peraturan, maka dipastikan sedang menetapkan sebuah kebijakan untuk publik.

Implementasi kebijakan sebagai proses pengambilan tindakan untuk memecahkan masalah publik, dimana pada tahap ini rancangan kebijakan diimplementasikan dan kebijakan tersebut diimplementasikan oleh departemen dan lembaga pemerintah masing-masing, bekerja sama dengan organisasi lain sesuai kebutuhan. implementasi kebijakan harus diterapkan dalam usaha, tindakan atau kegiatan yang menggunakan fasilitas yang dipilih sesuai dengan waktu tertentu untuk mencapai tujuan tertentu agar dapat memberikan hasil yang diharapkan. Implementasi suatu kebijakan adalah suatu tindakan yang ditetapkan dalam bentuk program, termasuk penyusunan langkah-langkah tindakan tertentu yang harus dilakukan, misalnya berupa langkah-langkah yang harus diikuti dan secara nyata yang berlangsung selama suatu jangka waktu tertentu untuk mencapai tujuan kebijakan.

Kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah dan mendapat legitimasi dari legislative yang umumnya dibuat dalam bentuk undang-undang, peraturan-peraturan maka harus dilaksanakan, dikelola, dan ditegakkan untuk membawa perubahan yang diinginkan pembuat kebijakan. Tugas ini dalam pelaksanaannya berada di tangan eksekutif pemerintah dan memerlukan penunjukan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas kebijakan baru tersebut. Secara teoritis, lembaga yang bertanggung jawab memiliki sumber daya dan wewenang untuk memastikan bahwa kebijakan baru diterapkan sebagaimana dimaksud, tetapi dalam kenyataannya hal ini tidak selalu terjadi.

Kebijakan publik diimplementasikan untuk mempengaruhi beberapa perubahan dalam perilaku populasi sasaran dan biasanya dapat diasumsikan bahwa perubahan ini akan memperbaiki masalah public, sehinggasmasuk akal bahwa jika ketentuan-ketentuan kebijakan tertentu tidak benar-benar ditegakkan, masalah akan tetap ada. Setelah prinsip-prinsip kebijakan baru diimplementasikan, evaluasi secara rinci kebijakan dapat dilakukan untuk menentukan apakah hasil yang diinginkan tercapai dan jika tidak, mengapa, dan apa yang perlu diubah.

Keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, sehingga para ahli memberikan beberapa model yang dapat digunakan dalam mengimplementasikan kebijakan publik. Edward III (Kusnandar,

2012, hal. 104–109) mengemukakan empat faktor dalam mencapai keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Sementara model yang dikembangkan oleh Cheema dan Rondinelli (Subarsono, 2005), faktor dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan dapat dilihat dari beberapa hal, diantaranya “Kondisi lingkungan, hubungan antar organisasi, sumberdaya organisasi untuk implementasi program, dan karakteristik dan kemampuan agen pelaksana”.

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, diantaranya dapat dilihat dari perencanaan yang efektif, rencana dan rancangan kebijakan yang baik dari kebijakan itu sendiri, tujuan kebijakan dibuat secara jelas dan konsisten, kerangka kelembagaan yang transparan dan persetujuan di tingkat tertinggi, adanya komunikasi dengan publik dan dengan semua pemangku kepentingan, adanya konsistensi dan kesinambungan dalam kebijakan, menetapkan tujuan dan tonggak yang realistis yang didukung oleh sumber daya, mementingkan fundamental ekonomi yang sehat, adanya mekanisme implementasi dan pengawasan yang kuat, dan stabilitas politik penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif.

METODE

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif, dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif melibatkan informan penelitian tentang pengalaman berkaitan dengan hal-hal yang terjadi dan memiliki pengetahuan luas tentang objek yang diteliti. Adapun penggunaan metode kualitatif ini yaitu untuk menganalisis tentang Implementasi Kebijakan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di UPTD Puskesmas Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan yang terdiri dari observasi dan melakukan wawancara secara mendalam dengan informan terpilih. Teknik pemeriksaan keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber, dengan teknik analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu langkah pertama mereduksi data, mendisplay data, melakukan penarikan kesimpulan dan terakhir melakukan verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran pelayanan kesehatan di masyarakat yang dilaksanakan oleh Puskesmas yaitu memberikan pencegahan dan perawatan primer, pencegahan penyakit, edukasi terhadap pasien pasien. Pelayanan kesehatan memiliki hubungan dengan masyarakatnya, namun demikian terdapat perbedaan terbesar antara kedua bidang tersebut yang terletak pada tujuannya masing-masing, dimana kesehatan masyarakat berfokus pada proses ilmiah pencegahan penyakit menular, sementara kesehatan masyarakat lebih berfokus pada keseluruhan kontribusi kesehatan fisik dan mental masyarakat. Puskesmas memiliki tugas dalam menjaga derajat kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya.

Derajat kesehatan masyarakat ditentukan oleh karakteristik lingkungan, karakteristik perilaku, kohesi sosial di lingkungan masyarakat tersebut. Modifikasi lingkungan yang tepat dapat membantu mencegah perilaku tidak sehat dan efek kesehatan negatifnya. Pelayanan kefarmasian oleh puskesmas tidak terlepas dari derajat kesehatan masyarakatnya. Dari hasil penelitian di wilayah kerja Puskesmas Cikatomas jumlah lahir hidup mencapai 802 jiwa dengan jenis kelamin laki-laki mencapai 427 jiwa, dan berjenis kelamin perempuan sebanyak 375 jiwa, dengan angka jumlah lahir mati sebanyak 1 jiwa. Jumlah kematian neonatal sebanyak 2 jiwa, adapun jumlah balita mati sebanyak 1 jiwa. Selanjutnya kejadian kematian ibu sepanjang tahun 2021 diketahui sebanyak 1 jiwa.

Data selanjutnya menunjukkan bahwa angka kejadian kesakitan yang terjadi di wilayah kerja UPTD Puskesmas Cikatomas pada tahun 2021, untuk persentase diare ditemukan dan ditangani, sebanyak 54,32%, sementara cakupan pengukuran tekanan darah mencapai 2,41. UPTD Puskesmas Cikatomas telah melakukan berbagai upaya untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara prima, sehingga masyarakat dapat meningkatkan derajat kesehatannya. Akses terhadap pelayanan kesehatan merupakan kemampuan untuk memperoleh pelayanan kesehatan seperti pencegahan, diagnosis, pengobatan, dan pengelolaan penyakit, penyakit, gangguan, dan kondisi lain yang berdampak pada kesehatan. Agar perawatan kesehatan dapat diakses, itu harus terjangkau dan nyaman. Banyak masyarakat terutama di perdesaan tidak memiliki akses ke perawatan kesehatan yang memadai.

Keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan akan dipengaruhi berbagai faktor, diantaranya faktor lingkungan yang terdiri dari faktor sosial budaya masyarakat dan respon dari penerima atau sasaran kebijakan. Sosio kultural merupakan istilah yang terkait dengan faktor sosial dan budaya, yaitu tradisi, kebiasaan, pola, dan kepercayaan umum yang ada dalam suatu kelompok masyarakat. Istilah tersebut terutama digunakan dalam konteks sosiologis dan pemasaran dan mengacu pada pendorong yang paling menonjol di balik cara seseorang membuat keputusan dalam masyarakat.

Memahami faktor sosial budaya sangat penting bagi setiap organisasi, dimana berkaitan dengan organisasi pelayanan publik akan lebih mengetahui dan memahami secara jelas lingkungan masyarakatnya. Penilaian faktor sosial budaya dapat menjawab berbagai pertanyaan tentang hal-hal yang bersifat umum yang dilakukan oleh masyarakat tempat. Budaya dan kesehatan sangat erat kaitannya, dimana masalah kesehatan yang sering muncul saat ini salah satunya disebabkan oleh budaya masyarakat itu sendiri. Kebudayaan atau budaya dapat membentuk kebiasaan dan tanggapan terhadap kesehatan dan penyakit di semua masyarakat, tanpa memandang tingkatannya.

Faktor budaya yang mempengaruhi pelayanan kesehatan kepada masyarakat diantaranya perkembangan teknologi, agama, filosofis, kekeluargaan, sosial, politik, hukum, ekonomi, pendidikan, gaya hidup dan kebiasaan-kebiasaan yang umum dilakukan oleh masyarakat setempat. Keberadaan Puskesmas di suatu daerah tentu

sebagai sarana untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mendekatkan akses layanan dalam bidang kesehatan. Berkaitan dengan tingkat sosial dan budaya masyarakat dan kesiapan Puskesmas dalam melaksanakan standar pelayanan kefarmasian. Faktor sosial dan ekonomi umumnya menjadi bahasan penting dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Pemerintah dalam hal ini melalui Puskesmas telah berupaya memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhannya. Pada saat ini Puskesmas telah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Sejatinya telah menjadi BLUD, UPTD Puskesmas Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya harus dapat memenuhi bidang Kefarmasian untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau pasiennya. Puskesmas Cikatomas harus memiliki kemampuan dalam mengelola keuangannya untuk memenuhi kebutuhan kefarmasian di Puskesmas, agar kebutuhan pasien atau masyarakat khususnya terkait dengan kebutuhan obat dapat terpenuhi di Apotek Puskesmas sendiri, sehingga pasien atau masyarakat tidak perlu mencari kebutuhan obatnya di luar Puskesmas Cikatomas yang akan membutuhkan lagi waktu dan biaya tambahan untuk membeli obat yang dibutuhkan.

Hasil penelitian menunjukkan UPTD Puskesmas Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya sebagai organisasi sektor publik perlu melakukan hubungan kerjasama dengan organisasi lain. Kelengkapan pemenuhan Standar Pelayanan Kefarmasian sudah menjadi keharusan yang dilaksanakan oleh pihak Puskesmas. Pelaksanaan dan implementasi upaya kesehatan dalam kebijakan akar rumput Puskesmas yang ada selama ini sangat bervariasi dari satu daerah ke daerah lainnya, namun secara keseluruhan belum menunjukkan hasil yang optimal. Pelayanan kefarmasian di Puskesmas merupakan bagian integral dari penyelenggaraan upaya kesehatan yang berperan penting dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Pelayanan kefarmasian di Puskesmas adalah untuk mendukung tiga fungsi pokok Puskesmas, yaitu sebagai pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan masyarakat, dan pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama yang meliputi pelayanan kesehatan, pelayanan kesehatan perseorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat. Pada dasarnya keberhasilan implementasi yang dinilai dalam konteks isu-isu tertentu dan faktor-faktor kritis yang mempengaruhi implementasi cukup bervariasi, dan kebijakan yang mungkin berhasil tidak selalu jelas. Implementasi yang efektif dikatakan sebagian telah ditentukan oleh kepemimpinan yang baik yang dapat menjadikan kunci utama dalam mencapai keberhasilan pencapaian tujuan dari serangkaian kebijakan.

Implementasi kebijakan yang efektif dan berhasil merupakan kunci pembangunan nasional. Secara singkat indikator efektivitas atau implementasi kebijakan banyak di antaranya dilihat dari aspek pelaksana kebijakan yang memiliki komitmen, dukungan politik terhadap kebijakan yang dilaksanakan, koherensi kebijakan dan stabilitas faktor sosial ekonomi dari waktu ke waktu, mengenali dampak dari kebijakan yang dirancang dengan baik. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan diperlukan adanya

berbagai dukungan terutama sumberdaya dalam mencapai keberhasilannya, karena tanpa adanya sumberdaya yang memadai, tujuan kebijakan tidak akan pernah tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan dengan dibandingkan dengan seluruh isi kebijakan dalam mencapai Standar Pelayanan Kefarmasian oleh UPTD Puskesmas Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya memerlukan strategi dalam mencapai keberhasilannya, hal tersebut dikarenakan masih adanya berbagai kekurangan untuk dapat memenuhi berbagai ketentuan tersebut di atas, seperti perencanaan terhadap kebutuhan sediaan farmasi dan bahas medis habis pakai, terutama dengan kebutuhan obat-obatan yang masih terbatas oleh keterbatasan anggaran. Fasilitas penunjang lainnya juga masih menjadi hambatan dengan keterbatasan ruang yang ada di UPTD Puskesmas Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson. (1997). *Pembuatan Kebijakan Publik*. Pustaka Pelajar.
- Dye, T. R. (2011). *Understanding Public Policy*. Prentice Hall.
- Islamy, I. (2004). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Sinar Grafika.
- Kusnandar, I. (2012). *Analisis Kebijakan Publik*. Multazam.
- Rusli, B. (2015). *Kebijakan Publik Membangun Pelayanan Publik yang Responsif*. Hakim Publishing.
- Subarsono, A. G. (2005). *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar.